

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Dengan disusunnya RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Padang,                      Februari 2018  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. HENDRI OCTAVIA.MSi  
NIP. 19581029 198703 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....	3
A. Visi .....	3
B. Misi .....	3
C. Tujuan .....	3
D. Sasaran .....	4
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019.....	6
A. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	6
B. Program dan Kegiatan.....	7
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 .....	18

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan dan kinerja tersebut diatas sudah tertata dengan baik.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2015-2019.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugas pokoknya terkait melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kehutanan pada tahun berjalan.

## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. VISI

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka visi Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

### B. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi diatas yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah misi kelima.

### C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi kelima yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Tujuan Yang Akan Dicapai Oleh Organisasi Dalam Jangka Waktu 2016-2021

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai Arahan KemenPAN-RB Oktober 2018
1.	Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya Kinerja Organisasi.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

#### D. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Tujuan sesuai Arahannya MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	83	84	85
				Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	5,15	6,15	7,15	8,15
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18,03	21.21
4.	Terwujudnya	2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

### III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

#### A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2019 adalah tahun keempat untuk Renstra Dinas Kehutanan periode Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Indikator Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2019		
1.	1.Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup	1.Persentase penurunan lahan kritis 2.Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100		
				Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	%	83		
				Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	%	83		
			Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	2.00		
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	6.15		
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	20		
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	14.86		
			2.Meningkatnya Kinerja Organisasi.	3.Nilai Evauasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB
						Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/keg.	%	95

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam implementasinya Rencana Kinerja Sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target
	<b>DINAS KEHUTANAN</b>		
<b>1</b>	<b>NON URUSAN</b>		
1	PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan
2	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan
4	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	23 unit
6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD terpenuhi	12 Bulan
8	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 Bulan
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	12 Bulan
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	12 Bulan
2	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR</b>	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dinas yang terpelihara	3 unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 bulan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	42 unit
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Peralatan dan perlengkapan	287 unit

		Peralatan/Perlengkapan Kantor	kantor yang terpelihara	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 unit
	6	Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	5 unit
	7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	40 unit
3		<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase disiplin aparatur	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ non PNS yang terpenuhi	510 orang
4		<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	16 Kali
5		<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	
	1	Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana	10 UPTD KPH
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 Bulan
	3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan
	4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok
	5	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok
<b>2</b>		<b>KEHUTANAN</b>		
	1	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	
	1	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Terlaksananya implementasi ISO 9001 : 2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan
	2	Pengembangan Data Dan Informasi Kehutanan	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Laporan
	3	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 buku
2		<b>PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM</b>	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	
	1	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	1 Lokasi
	2	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi	1 Lokasi
	3	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	1 lokasi
	4	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	1 lokasi
	5	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonsevasi	1 lokasi
	6	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	1 Lokasi
	7	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	1 lokasi

	8	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	1 Lokasi
	9	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	1 lokasi
	10	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	2 lokasi
	11	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	25 kali
	12	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dharmasraya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya	15 kali
	13	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	15 kali
	14	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	20 kali
	15	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	30 kali
	16	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan	15 kali
	17	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH sijunjung	15 kali
	18	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	15 kali
	19	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	20 kali
	20	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	20 kali
	21	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 kasus
	22	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit
	23	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	1 lokasi
	24	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang terlaksana	1 Laporan
	25	Pengukuran Simpanan Karbon	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak
	26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi SDA	450 orang
	27	Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan	Peta Laju Kerusakan hutan yang	6 peta

			tersusun	
	3	PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	
		1 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya	20 kali
		2 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dharmasraya	20 kali
		3 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 kali
		4 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 kali
		5 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai	20 kali
		6 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 kali
		7 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan	12 kali
		8 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung	20 kali
		9 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok	20 kali
		10 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 kali
		11 Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	23 kali
	4	REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Indeks tutupan hutan Persentase penurunan luas lahan kritis	
		1 Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 lokasi
		2 Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik	2 unit
		3 Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	250000 batang
		4 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman	6 Sertifikat/2 buku

				hutan	
		5	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS
		6	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	2 Buku
		7	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	180 hektar
	5		<b>PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN</b>	Optimalisasi PNBK sektor kehutanan dari HHK dan HHBK Presentase Pencapaian target produksi HHK dan HHBK	
		1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 Petak
		2	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak
		3	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak
		4	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	26 Unit
		5	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	10 Unit
		6	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	5 Unit
		7	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	3 Unit
		8	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 Unit
		9	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	2 Unit
		10	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang	4 Unit

				termonitor di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	
		11	Pembinaan PNBK Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBK sektor Kehutanan	10 UPTD KPH
		12	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi
		13	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 Komoditi
		14	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 Komoditi
		15	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 Komoditi
		16	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	1 Komoditi
		17	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi
		18	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 Komoditi
		19	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 Komoditi
		20	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 Komoditi
		21	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 Komoditi
		22	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit
		23	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak
		24	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak
		25	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak
		26	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak
		27	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak
		28	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak
		29	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak
		30	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan	20 Kali
6			PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN	Persentase luas kawasan hutan	

			yang dikelola oleh masyarakat		
		1	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali
		2	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 kali
		3	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali
		4	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali
		5	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali
		6	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit
		7	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 unit
		8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit
		9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 unit
		10	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit
		11	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit
		12	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 unit
		13	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 unit
		14	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum	110 Orang
		15	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 orang
		16	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	180 orang

	17	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelompok
	18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelompok
	19	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelompok
	20	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelompok
	21	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelompok
	22	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	3 Kelompok
	23	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelompok
	24	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelompok

	25	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelompok
	26	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelompok
	27	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali
	28	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	5 Kali
	29	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	20 Kali
7		<b>PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN</b>	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	
	1	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km
	2	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Agam Raya	3 unit
	3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit
	4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit
	5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	2 unit
	6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola Mentawai	2 unit
	7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	4 unit
	8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah	1 unit

				kelola KPH Pesisir Selatan	
		9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelolaan KPH Sijunjung	2 unit
		10	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok	4 unit
		11	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	8 unit
		12	Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku
		13	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Jumlah sosialisasi indentifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 kali
		14	Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	20 kali

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

## BAB IV. PENUTUP

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi Pembangunan kehutanan Sumatera Barat dan bagian dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 serta Rencana Straregis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang termuat di dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan target, tolok ukur dan indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel mengacu pada RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat sesuai RKT yang telah ditetapkan.

# LAMPIRAN

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
		b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	83%
		c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	83%
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	2.00%
		b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	6.15%
		c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	20%
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14.86%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%

Padang, Februari 2018  
Kepala Dinas Kehutanan

**Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si**  
NIP. 19581029 198703 1 003

